

FAKTA PERJANJIAN DAMAI DAN HUBUNGAN DIPLOMATIK NEGARA TIMUR TENGAH DALAM PROSES PERDAMAIAN KONFLIK ISRAEL-PALESTINA PASCA KEMERDEKAAN PALESTINA*

Masyrofah¹

Permalink: <https://www.academia.edu/15117188>

Abstract: Peace Agreement Phenomena and Diplomatic Ties between Middle East Countries in Implementing Peace Process Regarding to Israeli-Palestinian Conflict after Palestine's Independence. The full membership of Palestine in United Nations becomes a starting point of international recognition of Palestine's Statehood. Palestine has perceived its independence as "second round of independence" since its independence has been declared in 1988. Despite of Israeli's settlement in West Bank and Jerusalem, Peace Process Agreement has been continuing. Middle East countries' contribution has been so significant in terms of facilitating the agreement process. The recognition of Palestine's statehood is hoped to put pressure on Israel to continue the talk on the agreement process and eventually stop the settlement. At the end, the "two state solution" can be implemented.

Key Words: Israeli-Palestinian Peace Agreement, the Role of Middle East, Two State Solutions

Abstrak: Fakta Perjanjian Damai dan Hubungan Diplomatik Negara Timur Dalam Proses Perdamaian Konflik Israel-Palestina Pasca Kemerdekaan Palestina. Peningkatan status Palestina menjadi anggota penuh PBB menjadi titik penentu adanya dukungan internasional akan pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat. Rakyat Palestina memaknai sebagai kemerdekaan Palestina jilid 2, karena kemerdekaannya telah dideklarasikan pada tahun 1988. Perundingan damai masih terus diupayakan oleh kedua belah pihak di tengah kemelut pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem. Peran negara Timur Tengah sangat besar dalam memfasilitasi proses perundingan. Harapan dari peningkatan status ini dapat menekan Israel agar melanjutkan perundingan dan menghentikan pembangunan pemukiman. Sehingga akhirnya dapat mewujudkan "two-states solution" (dua negara Palestina-Israel secara berdampingan).

Kata Kunci : Perundingan damai Israel-Palestina, Peran Timur Tengah, Two States Solutions

* Diterima tanggal naskah diterima: 22 Februari 2015, direvisi: 24 Maret 2015, disetujui untuk terbit: 27 Mei 2015.

¹ Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Jln. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel. E-mail: masyrofah@uinjkt.ac.id.

Pendahuluan

Konflik yang terjadi antara Israel-Palestina mempunyai sejarah panjang. Konflik tersebut telah berlangsung sejak puluhan tahun, terutama sejak berdirinya Negara zionis Israel tahun 1948. konflik antara Israel-Palestina pada dasarnya menyangkut dua isu pokok, yaitu masalah hak rakyat Palestina untuk mendirikan Negara di atas tanah airnya sendiri dan hak bangsa Yahudi untuk memilih negaranya sendiri (Israel) dan hidup tentram dan damai dengan tetangga Arabnya.²

Setelah perang besar Arab-Israel tahun 1948, perang Enam Hari (*Six Days War*) tahun 1967, dan perang Yom Kippur tahun 1973, seluruh wilayah Palestina sudah direbut oleh Israel dan mengklaim sebagai wilayah Israel. Wilayah tersebut meliputi Tepi Barat dan daerah Gaza yang direncanakan akan menjadi wilayah Negara Palestina oleh para pemimpin Arab. Konflik terus berkembang karena kedua pihak tetap bersikeras untuk saling mempertahankan wilayah masing-masing. Konflik tersebut diikuti dengan perang-perang kecil yang berbuntut pada konflik antar bangsa, tidak hanya antara bangsa Yahudi dengan bangsa Palestina tetapi secara keseluruhan terjadi perang Arab-Israel.

Berbagai upaya proses perundingan damai telah dilakukan, yaitu Camp David I (1979), Perjanjian Oslo I (13 September 1993), Perjanjian Kairo (1994), Perjanjian Oslo II (28 September 1995), Kesepakatan Hebron (1997), Wye River Agreement (1998), Sharm el-Sheikh di Mesir (1999), Camp David II (2000), hingga Konsep Peta Jalan Damai (*Road Map*).

Dalam beberapa perundingan tersebut seringkali sikap Israel yang mangkir dalam melaksanakan isi perundingan. Mantan Menteri Luar Negeri AS James Baker mengatakan bahwa perdamaian dapat muncul di Timur Tengah hanya jika semua pihak dalam konflik itu menghendakinya. Namun Israel dengan jelas menunjukkan bahwa ia telah secara konsisten lebih memilih tanah daripada perdamaian. Sebagaimana dikatakan oleh Perdana Menteri Israel pertama David Ben Gurion bahwa “perdamaian memang penting tetapi tidak untuk ditukar dengan harga berapa pun”. Itulah prinsip yang menuntun setiap pemimpin Israel selanjutnya.³

Dalam konteks inilah Presiden Mahmoud Abbas mengubah strategi perjuangan Palestina dengan mengajukan permohonan ke PBB

² Lihat H.A Chalid Mawardi “*Dimensi Internal Timur Tengah Pasca Perang Teluk: Peran Suriah*”, dalam BantartoBandoro, *Timur Tengah Pasca Perang Teluk: Dimensi Internal dan Eksternal*, (Jakarta, CSIS, 1991), h. 17

³Paul Findley, *Diplomasi Munafik Yahudi (Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel)*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 283

untuk diterima sebagai anggota penuh (*full member*). Hanya negara berdaulat yang dapat diterima sebagai anggota penuh PBB. Selama ini keberadaan Palestina di PBB hanyalah sebagai peninjau (*observer*). Itu pun bukan dalam bentuknya sebagai negara, melainkan sebuah gerakan yang disebut sebagai Organisasi Pembebasan Palestina yaitu *Palestine Liberation Organization* (PLO). Di dalam elite politik Palestina sebenarnya strategi Abbas ini mendapat tentangan.

Garis keras Hamas berpendirian terbentuknya negara Palestina harus menghilangkan negara Israel yang dianggap tidak sah. Hamas tidak berkeinginan negara Palestina hidup berdampingan dengan negara Israel. Terlepas dari pertentangan yang ada antara berbagai faksi dan kelompok di tubuh elite Palestina, upaya yang dilakukan Presiden Abbas merupakan upaya yang spektakuler dan bersejarah. Dikatakan spektakuler disinikarena merupakan upaya di tengah kebuntuan perundingan. Perundingan sekadar 'membeli waktu' yang pada akhirnya negara Palestina tidak akan pernah hadir.

Keinginan Palestina untuk diterima sebagai anggota PBB bukan hal yang mudah. Hal tersebut bergantung kepada sikap dari Amerika Serikat dan negara-negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan (DK) PBB. Ada tiga organ PBB yang terlibat dalam penerimaan Palestina sebagai anggota PBB yakni Sekretariat Jenderal, DK, dan MU. Sekretariat Jenderal adalah organ yang menerima surat permohonan. Surat permohonan ini diteruskan ke DK yang selanjutnya akan menyampaikan rekomendasi ke MU.

Sesuai Pasal 4 Piagam PBB, kewenangan untuk memutus diterima atau tidaknya aplikasi suatu bangsa menjadi anggota PBB terletak pada MU. Hanya saja, MU tidak akan memutus bila tidak mendapatkan rekomendasi dari DK. Di sinilah permasalahan muncul. Ini mengingat meski sembilan dari 15 anggota DK menyetujui rekomendasi, bila ada satu anggota tetap yang melaksanakan hak vetonya, rekomendasi akan kandas. Berarti kandas pula keinginan Palestina menjadi anggota tetap.

Presiden Barack Obama mengemukakan pendirian AS yang tidak akan menyetujui berdirinya negara Palestina melalui mekanisme PBB, tapi melalui perundingan. Pendirian Obama dapat dipahami karena dia akan menghadapi pemilihan Presiden. Terlebih lagi Obama tidak berdaya menentang lobi kuat Yahudi dan ketidaksetujuan Israel. Padahal bila hak veto benar dilakukan AS, ini merupakan ironi dalam kebijakan luar negeri Obama. Pertama, kampanye Obama yang selalu mendengungkan perubahan (*change*) ternyata tidak terbukti.

Masyروفah

Obama gagal melakukan perubahan mendasar politik luar negeri AS di Timur Tengah. Kedua, AS akan berhadapan dengan kebijakan luar negerinya sendiri yang selalu mendorong demokrasi dan proses demokratisasi di penjuru dunia, termasuk di Timur Tengah. Veto AS untuk melindungi Israel berarti pengabaian demokrasi dan demokratisasi pada masyarakat internasional dan PBB. Saat ini paling tidak ada 120 negara di MU-PBB yang siap mendukung permohonan Palestina untuk menjadi anggota penuh. Bila demokrasi dimaknai sebagai suara terbanyak yang harus didengar, apakah tepat bagi AS untuk tidak mendengarnya? Apakah AS bersiap untuk bernasib sama dengan berbagai rezim otoriter yang ditumbangkan karena kekuasaan absolut dan kediktatoran? Dilema inilah yang dihadapi Presiden Obama dan AS.

Padahal berdirinya negara Palestina merupakan suatu keniscayaan, hanya waktu dan metode seperti apa negara tersebut akan terbentuk. Waktu sepertinya tidak berpihak pada AS dan Israel. Rakyat Palestina dan kebanyakan masyarakat internasional sudah tidak sabar menanti terwujudnya cita-cita dan perjuangan panjang bangsa Palestina. Bila mekanisme perundingan yang dipilih AS, terbentuknya negara Palestina harus dilakukan sebelum DK mengeluarkan rekomendasi ke MU.⁴

Pasca mendapat pengakuan sebagai negara oleh PBB, Palestina kini berusaha mendorong kelanjutan perundingan damai dengan Israel. Namun di sisi lain, Palestina menyatakan penolakannya terhadap rencana perluasan pemukiman Israel di wilayah Yerusalem dan Tepi Barat. "Saya sudah mengatakan sebanyak ribuan kali bahwa kami sangat ingin melanjutkan perundingan (dengan Israel) dan kami benar-benar siap untuk melakukannya," ujar Presiden Palestina Mahmud Abbas.⁵

Dalam sidang Majelis Umum PBB di New York, pada Kamis 29 November 2012, Palestina memperoleh suara bulat dalam voting yang digelar terkait resolusi peningkatan status Palestina di PBB. Palestina mendapat dukungan mayoritas yakni 138 negara anggota majelis umum PBB. Sementara hanya 9 negara anggota yang menolak dan sisanya, 41 negara menyatakan abstain dalam voting yang digelar.

Kini PBB mengakui status baru Palestina sebagai negara pemantau non-anggota dari status sebelumnya yang hanya sebagai

⁴Hikmahanto Juwana, Palestina Merdeka, Seputar Indonesia, 26 September 2011, diakses pada www.gagasanhukum.com, 23 Maret 2013

⁵ Liputan Wawancara dengan wartawan di New York, AS, seperti dilansir *AFP*, Sabtu (1/12/2012)

entitas pemantau. Peningkatan status ini merupakan bentuk implisit kenegaraan yang membuat Palestina kini setara dengan Vatikan. Namun sehari setelahnya, Israel memberikan pengumuman mengejutkan dengan menyatakan rencananya untuk membangun pemukiman baru yang terdiri atas 3.000 rumah di sekitar wilayah Yerusalem timur dan Tepi Barat, tanpa merinci lokasi tepatnya. Terhadap hal ini, Presiden Abbas menentang keras. "Kami tidak menetapkan kondisi tertentu, tapi setidaknya ada 15 resolusi PBB yang menganggap kegiatan pembangun pemukiman semacam itu merupakan tindakan ilegal dan menjadi hambatan bagi proses perdamaian," ucap Abbas. "Mengapa (Israel) tidak menghentikan rencana pembangunan pemukiman tersebut," imbuhnya.

Diketahui bahwa perundingan damai antara Israel dengan Palestina telah dimulai sejak September 2010. Namun tindakan Israel yang memperluas pembangunan pemukiman bagi warganya di Yerusalem membuat Palestina berang. Perundingan tersebut kemudian terhenti dan Palestina memberikan syarat untuk melanjutkan perundingan tersebut kembali, yakni Israel harus bersedia menghentikan seluruh aktivitas pembangunan pemukiman semacam itu. Namun, Israel enggan menuruti syarat tersebut dan bersikeras pada posisinya.

Sebelumnya diberitakan bahwa rencana pembangunan pemukiman baru Israel ini juga mendapat kritikan keras dari AS yang merupakan sekutu dekat Israel. AS menilai, rencana tersebut justru memundurkan proses perdamaian dengan Palestina.

Hasil dan Pembahasan

Esensi dari proses tawar-menawar meliputi: Penentuan komitmen atas posisi-posisi penting, penentuan masalah di mana konsesi bisa dibuat, persiapan ancaman dan janji-janji, dan tetap sabar. Akan tetapi kondisi yang perlu, meskipun tidak cukup untuk menjamin suksesnya suatu negosiasi adalah adanya kesamaan kepentingan di antara kedua belah pihak untuk menghindari kekerasan. Tanpa adanya kesamaan kepentingan ini, pasti tidak akan ada kompromi. Apabila negosiasi dilakukan sebelum terdapat kesamaan kepentingan, maka negosiasi hanya akan merugikan kedua belah pihak, membuang-buang waktu atau hanya bertujuan propaganda belaka.

Menurut peneliti hal tersebut di atas jelas terlihat pada proses negosiasi perundingan damai antara Israel dan Palestina, dimana tidak adanya kesamaan kepentingan baik dari pihak Israel maupun Palestina. Ketika perundingan damai sedang berlangsung, Palestina mengajukan

Masyrafah

syarat penting agar Israel segera menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina, karena jelas telah melanggar batas teritorial dan melanggar hukum internasional. Namun, Israel tetap bersikeras tetap melanjutkan pemukiman tersebut, padahal itu sikap yang menciderai perundingan damai yang sedang berlangsung. Terlebih aksi kekerasan pasukan militer Israel tetap terjadi terhadap rakyat Palestina. Posisi tawar menawar Palestina yang lemah di mata Israel, membuat perundingan damai tidak menghasilkan kesepakatan yang benar-benar ditaati isinya oleh kedua pihak. Sikap ambigu inilah yang mengakibatkan tidak akan pernah tercapainya kata kompromi antara kedua belah pihak dan perundingan damai mengalami stagnansi. Sikap yang mendua seringkali dilakukan Israel yaitu tetap menginginkan proses perundingan damai namun di sisi lain memaksakan kehendaknya terhadap isi kesepakatan yang dibuat. Akhirnya proses negosiasi mengalami kebuntuan karena tidak adanya kesamaan kepentingan, maka negosiasi hanya merugikan kedua belah pihak, membuang-buang waktu dan malah bertujuan sebagai propaganda belaka.

Menurut Peneliti Bidang Politik LIPI Hamdan Basyar bahwa ada kesalahfahaman dalam memaknai kata “kemerdekaan Palestina” yang umumnya dipakai media ketika Palestina berhasil mengajukan permohonan ke MU PBB dan akhirnya melalui voting PBB mengeluarkan resolusi mengenai peningkatan status Palestina pada 29 November 2012. Yang perlu diklarifikasi adalah pada hakikatnya Palestina sudah merdeka sejak dideklarasikan pada Deklarasi Kemerdekaan Palestina 15 November 1988 di Aljazair. Namun faktanya rakyat Palestina masih terjajah oleh Israel. Hal inilah yang mendorong Presiden Mahmoud Abbas untuk mengajukan permohonan PBB dan akhirnya Majelis Umum menyetujui peningkatan status Palestina menjadi anggota penuh (*full member*) yang sebelumnya hanya sebagai negara pemantau (*observer*). Dan peningkatan status itulah yang menjadi substansi resolusi PBB tersebut. Peneliti memahami ketika dunia memaknainya sebagai kemerdekaan Palestina, karena semenjak dideklarasikan negara Palestina tahun 1988, namun yang terjadi malah konflik yang tak terselesaikan. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa itu merupakan “Kemerdekaan Palestina Jilid 2”.⁶

Mengikuti perkembangan situasi politik internal di Palestina cukup tegang setelah Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas

⁶Wawancara pribadi dengan Hamdan Basyar, (Peneliti LIPI Bidang Politik Timur Tengah dan *Presiden Eksekutif The Indonesian Society For Middle East Studies*) pada Rabu 16 Oktober 2013

menerima tawaran Israel agar melakukan perundingan perdamaian langsung antara Palestina dan Israel setelah Presiden AS Barack Obama berhasil membujuk Palestina untuk maju berunding langsung dengan Israel tanpa Israel menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat, yang secara hukum internasional merupakan wilayah Palestina. Mereka yang di Tepi Barat yang selama ini mendukung Mahmoud Abbas juga kecewa karena perundingan langsung dilakukan tanpa syarat. Padahal aspirasi internal Palestina, khususnya para pendukung Abbas di Tepi Barat, menuntut agar Israel menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi sebelum perundingan perdamaian kedua pihak dilanjutkan.

Pada 2010 Abbas menghentikan perundingan perdamaian karena ada desakan di internal Palestina agar perundingan dihentikan kecuali kalau Israel menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi. Tapi, setelah dibujuk Presiden Barack Obama, Abbas setuju melakukan perundingan langsung sesuai tuntutan Israel tanpa syarat. Dan begitu perundingan dilangsungkan di Washington beberapa waktu lalu, Israel segera mengumumkan akan membangun ribuan rumah lagi di Tepi Barat. Kemarahan Abbas – untuk meredam kekecewaan Palestina yang semakin luas -- dibujuk AS dengan mengatakan AS tidak mengakui pemukiman-pemukiman Yahudi itu. Ketidakberdayaan pemerintahan Obama untuk menekan Israel agar menghentikan pemukiman Yahudi di Tepi Barat itu disebabkan lobi Yahudi yang sangat kuat di AS. Kecaman AS terhadap pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat tidak berpengaruh besar untuk menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi tersebut yang jelas-jelas melanggar wilayah teritorial Palestina dan memperkeruh suasana perundingan damai yang sedang berlangsung. Hal tersebut terjadi lagi-lagi dikarenakan kuatnya lobi-lobi Yahudi di kalangan petinggi AS.

Selain ditentang oleh sebagian pendukung Mahmoud Abbas, warga Palestina lain – yang menghuni Jalur Gaza – justru menentang keras secara terbuka. Mereka adalah *Harakah al-Muqawwamah al-Islamiyah* (Gerakan Perlawanan Islam), yang lebih dikenal dengan singkatannya Hamas. Lebih jauh, Hamas menolak perundingan perdamaian Israel-Palestina dalam bentuk apapun. Gerakan ini memang tidak mengakui eksistensi Israel. Bila PLO (*Palestinian Liberation Organization*) yang dipimpin Abbas mengakui Israel dan mendukung jalan diplomasi dalam berhadapan dengan Israel, Hamas justru memilih mengangkat senjata. Hamas ingin mengusur Israel hingga ke pantai dan di wilayah Palestina dan Israel akan didirikan negara Islam yang berdaulat, sementara PLO yang menganut

Masyrafah

ideologi nasionalis-sekuler hanya ingin mendirikan negara sekuler yang demokratis di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur yang akan dijadikan ibu kota Palestina merdeka kelak. Ideologi dan pengakuan PLO atas eksistensi Israel inilah yang mendorong Israel, AS, Uni Eropa, dan sejumlah Negara Timur Tengah menyokong perundingan perdamaian yang akan berujung pada kemerdekaan Palestina yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel dengan batas teritori sebelum perang Arab-Israel tahun 1967.

Mencermati prospek perundingan damai Israel-Palestina pasca kemerdekaan Palestina jilid 2 yaitu pada 29 November 2012 Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka, proses perdamaian kedua belah pihak tetap sulit. Paling tidak ada tiga hal vital yang menjadi batu sandungan bagi pencapaian perdamaian Israel-Palestina melalui perundingan. *Pertama*, isu sekitar 5 juta pengungsi Palestina yang terkonsentrasi di Jalur Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Pengungsi Palestina juga terdapat di Negara Timur Tengah lain seperti Mesir dan kerajaan-kerajaan Arab di Teluk Persia, serta negara Eropa. Namun jumlahnya tidak banyak. Mereka ini sebelumnya hidup di rumah-rumah, mereka di wilayah Israel sekarang. Tapi sejak Perang Arab-Israel tahun 1948 dan 1967, mereka terusir dari rumah. Mereka diakui oleh PBB sebagai pengungsi dan berhak kembali ke kampungnya di Israel. Tapi Israel menolak keras hak pulang Palestina ini. Karena jika mereka diizinkan pulang, jumlah penduduk Palestina di Israel akan membengkak, sehingga kemungkinan akan melampaui atau sama dengan jumlah populasi Yahudi di Israel sekarang berkisar kurang lebih ada 6,5 juta jiwa. Dengan demikian, identitas Israel sebagai negara Yahudi akan lenyap, bahkan Palestina bisa jadi presiden di negara itu.

Kedua, masalah perbatasan. Palestina menuntut seluruh orang Yahudi yang hidup di teritori Palestina sebelum perang 1967, harus meninggalkannya. Tuntutan Palestina itu sesuai dengan Resolusi DK PBB 242. Dengan demikian, Israel harus menghancurkan ribuan rumah mereka di Tepi Barat dan kembali ke wilayah mereka di Israel. Israel menentang keras hal ini. Kalau tunduk pada tuntutan Palestina, Israel akan kehilangan banyak teritori yang dicaplok dari Palestina. Israel juga akan kehilangan situs-situs Yahudi di Tepi Barat.

Ketiga, masalah Yerusalem Timur. Wilayah ini terdapat Masjidil Aqsa, masjid tersuci ketiga kaum muslim setelah Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Tuntutan Palestina ini sah secara hukum, namun konsensus di Israel memperlihatkan seluruh rakyat Israel menuntut Yerusalem Timur, yang terdapat Tembok

Ratapan yang berada dekat dengan Masjidil Aqsa. Tembok Ratapan merupakan tempat tersuci orang Yahudi. Dan Yerusalem Timur pun menyimpan banyak sekali situs Yahudi, termasuk yang berada di bawah lantai Masjidil Aqsa. Di situ diyakini terdapat kuil Raja Solomon (Nabi Suleman) dan wilayah yang di huni oleh sekitar 200.000 orang Palestina pada saat ini merupakan identitas negara Yahudi. Hal lain yang diinginkan Israel adalah negara Palestina merdeka kelak tidak memiliki angkatan bersenjata, perbatasannya dijaga oleh Israel, dan Israel bebas menerbangkan pesawatnya, termasuk pesawat militer di langit Palestina. Hal-hal inilah yang membuat saya skeptis bahwa perundingan perdamaian bisa dicapai dalam waktu 9 bulan seperti yang disepakati Israel dan Palestina di Washington beberapa waktu lalu.

Pendapat yang berbeda disampaikan Hamdan Basyar bahwa tidak ada keterkaitan antara permohonan Palestina ke MU PBB yang akhirnya diakui sebagai negara Palestina merdeka dengan proses perundingan damai yang terus diupayakan. Keduanya merupakan dua hal yang terpisah dan bukan sebab akibat dari peristiwa tersebut. Pada hakikatnya perundingan damai terus diupayakan melalui upaya diplomasi dan kompromi antara kedua belah pihak. Ditengah perjalanan perundingan tersebut, Presiden Mahmoud Abbas melakukan terobosan melalui permohonan ke MU PBB agar eksistensi Palestina sebagai negara berdaulat lebih diakui di dunia internasional.⁷

Menurut Smith Al-Hadar⁸ yang melatarbelakangi adanya perubahan strategi politik Palestina oleh PM Mahmoud Abbas dari perundingan damai dengan Israel menjadi peningkatan status baru Palestina sebagai negara pemantau non-anggota dari status sebelumnya yang hanya entitas pemantau yaitu supaya memaksa Israel maju ke meja perundingan. Kemudian, *bargaining power* Palestina pun meningkat. Dan yang lebih penting Israel kini berunding dengan sebuah negara berdaulat. Keinginan Israel sebelumnya agar Palestina hanya diberi otonomi luas dengan cara mengulur-ulur waktu perundingan sambil Israel terus membangun pemukiman Yahudi di wilayah Palestina agar suatu waktu ketika Israel menyerahkan Tepi Barat ke Palestina, wilayah itu tinggal tanah gersang dan bebatuan dan Yerusalem secara fisik telah menjadi milik Israel pupus sudah.

Dengan langkah itu, Mahmoud Abbas tidak melanggar Kesepakatan Oslo I dan II. Pertama, kesepakatan itu menetapkan

⁷Wawancara pribadi dengan Hamdan Basyar (Peneliti bidang Politik LIPI dan *President Executive The Indonesian Society for Middle East Studies*), Rabu 16 Oktober 2013 di LIPI.

⁸Penasihat Pada The Indonesian Society for Middle East Studies.

Masyrafah

perundingan kedua belah pihak selama lima tahun dari 1993-1998. Periode itu sudah terlewati karena ulah Israel. Sebagaimana kita ketahui, Kesepakatan Oslo dicapai setelah perundingan rahasia antara Yasser Arafat sebagai pimpinan PLO dan duet PM Israel mending Yitzhak Rabin dan Menlu Shimon Peres dari Partai Buruh. Penandatanganan dokumen kesepakatan itu dilakukan di Gedung Putih dengan Presiden AS Bill Clinton sebagai saksi. Saat itu, Benjamin Netanyahu sebagai ketua partai garis keras Likud menentang kesepakatan tersebut. Dan ketika Rabin tewas di tangan seorang pemuda Yahudi fanatik, Netanyahu naik ke kursi kekuasaan sebagai PM Israel yang baru. Ia pun enggan mengimplementasi kesepakatan itu dan meneruskan perundingan hingga tenggat waktu 5 tahun selesai. Biar begitu Kesepakatan Oslo tak bisa disingkirkan. PLO yang kemudian menjadi Otoritas Palestina di bawah kepemimpinan Arafat dan kemudian digantikan Mahmoud Abbas setelah Arafat meninggal, mencoba terus memelihara spirit Kesepakatan Oslo dengan terus memilih perjuangan melalui jalan diplomatik. Langkah Abbas memohon MU PBB mengabulkan permohonan Palestina untuk mengakuinya sebagai negara merdeka sama sekali tidak melanggar Kesepakatan Oslo karena dokumen itu tidak mencantumkan larangan bagi langkah semacam itu. Toh, kesepakatan perdamaian melalui perundingan yang menjadi substansi Kesepakatan Oslo tetap terpelihara. Langkah Abbas memohon pengakuan MU PBB mengakui kemerdekaan Palestina hanyalah strategi untuk memungkinkan Kesepakatan Oslo yang sempat mati suri dapat dihidupkan kembali.

Adapun mengenai kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perundingan damai Israel-Palestina sehingga sulit diselesaikan adalah faktor internal Israel sendiri dan faktor eksternal. Faktor internal adalah Palestina sering dijadikan isu politik di antara partai-partai politik di Israel. Kebijakan terhadap Palestina sering menjadi penyebab kalah atau menangnya suatu partai di Israel. Pembangunan pemukiman Yahudi selalu menjadi faktor penting bagi partai-partai yang berkuasa maupun partai-partai oposisi. Ketakutan Israel pada Palestina di masa depan juga menjadi kendala bagi perdamaian Palestina Israel. Tepi Barat merupakan kawasan berbukit yang memudahkan Palestina melancarkan serangannya terhadap Israel di suatu waktu. Itu sebabnya, salah satu agenda Israel dalam perundingan perdamaian dengan Palestina adalah menuntut Palestina tidak boleh memiliki angkatan bersenjata dan perbatasannya diawasi oleh Israel, yang tentunya ditolak keras oleh Palestina. Faktor eksternal adalah dukungan tanpa batas AS terhadap Israel. AS bukan

hanya memberi dukungan politik yang kuat pada Israel, tapi juga memasok peralatan perang canggih ke Israel serta memberi bantuan ekonomi yang cukup besar pada negara kecil itu, yaitu US\$ 5 milyar, malah mungkin lebih, setiap tahun. Dukungan tanpa batas AS ini membuat Israel merasa aman dengan sikap kerasnya terhadap Arab. Lalu, dukungan kuat negara-Negara Timur Tengah, Organisasi Konferensi Islam, dan Gerakan Non-Blok kepada Palestina. Mereka menuntut Israel memerdekakan Palestina dengan batas negara Palestina sebelum perang 1967, yang ditolak Israel karena itu berarti Israel akan kehilangan Yerusalem Timur dan ratusan pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang menempati cukup besar wilayah Palestina.

Peneliti sependapat dengan pendapat diatas yang dikemukakan oleh Bpk. Smith Al-Hadar mengenai kendala-kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perundingan sehingga seringkali mengalami kebuntuan. Di sisi lain yang patut dipertimbangkan adalah perbedaan pandangan antara Fatah dan Hamas. Dua partai politik yang saat ini berpengaruh besar pada dinamika politik Palestina. Fatah yang menguasai Tepi Barat gencar mengupayakan upaya diplomasi oleh Presiden Mahmoud Abbas, di sisi lain Hamas yang menguasai Jalur Gaza justru tidak mempercayai hasil perundingan tersebut. Namun, pada perkembangan terkini ada sinyal positif dari Hamas yang mungkin menyetujui perundingan damai asalkan Israel segera menghentikan seluruh pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. Pertentangan internal inilah yang justru melemahkan posisi tawar Palestina, malah justru menguntungkan posisi Israel sehingga perundingan seringkali memakan waktu berlarut-larut tanpa solusi nyata.

Menurut Peneliti, faktor dalam negeri Israel turut berperan dalam proses perundingan damai. Terdapat dua aliran utama di Israel yang saling bersaing dan bertentangan dalam memahami paham-paham zionisme, baik secara ideologis, pemikiran dan taktik pelaksanaan, yaitu; *Pertama*, Partai Kanan Tengah Likud; cenderung kaku dan radikal dalam memahami paham-paham Zionisme, dimana tokoh Likud yaitu Menachem Begin dan Yitzhak Shamir menolak Resolusi 181 dan 242 karena mereka tetap berpegang teguh kepada visi Revisionis, yaitu klaim bahwa Israel Raya (*Eretz Israel*) yang membentang dari sungai Nil sampai Eufrat adalah hak bangsa Yahudi yang sudah digariskan Tuhan. Pemahaman inilah yang menjadikan Partai Likud cenderung kaku dalam menjalankan proses perundingan damai.

Kedua, Partai Kiri Tengah Buruh; lebih moderat dan pragmatis memahami paham-paham Zionisme, bersedia melepaskan tanah yang

Masyrafah

berpenduduk mayoritas Arab, siap menerima jalan kompromi dengan Palestina – sekalipun tidak mereka tidak selalu mempraktikannya – dan menerima gagasan pembagian wilayah Palestina tahun 1947 serta rumusan tanah untuk perdamaian (*Land of Peace*) sebagaimana termuat dalam Resolusi 242.

Kepala Otorita Palestina (*Ramallah*) Mahmoud Abbas mengatakan, sampai saat ini 130 negara di dunia telah menyatakan mengakui berdirinya negara Palestina Merdeka. Dikatakannya bahwa dari 130 negara itu sebagian sudah menyatakan sikap mendukung kemerdekaan Palestina sejak tahun 1988 sementara sebagian lagi baru mengumumkan sikapnya belum lama ini. Abbas menambahkan, saat ini 10 negara di kawasan Amerika Latin telah menyatakan mendukung kemerdekaan Palestina dan sekitar 20 negara lainnya akan segera mengumumkan sikap mereka.

Kepala Otorita *Ramallah* mengungkapkan berdirinya negara Palestina merdeka dengan batas wilayah tahun 1967 mungkin akan diakui secara resmi pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Kami menghendaki dimulainya lagi perundingan untuk mewujudkan pengakuan akan berdirinya negara Palestina di tingkat internasional,” ujarnya.

Turki menyatakan dukungan bagi deklarasi kemerdekaan Palestina dan mendesak masyarakat internasional membantu Palestina hidup damai dan bermartabat. Ankara bergabung dengan negara-negara pendukung kemerdekaan Palestina untuk mendapatkan pengakuan PBB. “Otorita Palestina telah membuktikan kepada semua pihak yang skeptis bahwa mereka layak mendapat pengakuan internasional, meskipun mereka terus menderita di bawah pendudukan,” kata Duta Besar Turki untuk PBB, Ertugrul Apakan, sebagaimana dilaporkan harian *Zaman*. “Kini tiba waktunya untuk menunjukkan solidaritas atas Palestina dan membantu mereka hidup dalam damai dan bermartabat,” tegas diplomat senior Turki ini. Palestina berjuang demi mendapatkan pengakuan PBB untuk membentuk sebuah negara independen.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas memperingatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa tawaran perundingan damai dengan Isarel merupakan kesempatan terakhir menuju perdamaian Palestina-Israel. Menurutnya, dunia harus menekan Israel. Abbas meminta bila perundingan terjadi nanti semua sengketa dapat terselesaikan. Berbicara didepan Sidang Umum PBB, Abbas meminta komunitas internasional agar mendesak Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi di tanah Palestina. Pembangunan pemukiman tersebut dianggap sebagai salah satu akar permasalahan

yang mengganggu proses perdamaian antara Palestina dan Israel.

“Waktu terus berjalan, jendela perdamaian semakin dekat dan kesempatan semakin berkurang,” ungkap Abbas, seperti dikutip dari *Al-Jazeera*, Jumat (27/9/2013). “Babak terbaru dari negosiasi hadir untuk menyadarkan ini adalah langkah terakhir menuju perdamaian,” ditegaskan Abbas. Pemimpin Palestina telah berusaha dalam beberapa kesempatan di PBB dan sejumlah pertemuan umum untuk membangun momentum perdamaian yang dapat memengaruhi Israel. Upaya damai dengan Israel merupakan yang pertama sejak mengalami kebekuan selama tiga tahun.

Israel juga belum menanggapi desakan yang disampaikan Abbas di depan PBB melalui pidatonya. Sampai Kamis, 26 September 2013 belum ada perwakilan Israel yang datang di Sidang Umum PBB, disebabkan pertemuan tersebut tepat dengan hari libur kaum Yahudi. Perwakilan Israel yang dijadwalkan datang ke New York, akan tetapi Israel yang diwakili Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sepertinya lebih memfokuskan kunjungan untuk membahas masalah keterbukaan Iran, dibanding perundingan damai dengan Palestina.

Negara-negara Timur Tengah yang secara resmi telah berdamai dengan Israel adalah Turki, Mesir, dan Yordania. Sebelum Februari 2011, Mesir merupakan salah satu Negara Timur Tengah yang mengalaminya, peran Mesir dalam proses hubungan Israel-Palestina agak berkurang. Tahun lalu, di era Ikhwanul Muslimin, Mesir memprakarsai gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Itulah satu-satunya keterlibatan Mesir dalam konflik Palestina-Israel sejak jatuhnya Presiden Hosni Mubarak pada 11 Februari 2011. Biasanya Mesir, Negara Timur Tengah garda depan yang paling berpengaruh baik terhadap Israel maupun Negara Timur Tengah lain, selalu hadir dalam mendorong proses perdamaian Palestina-Israel. Hubungan Israel dengan Yordania, yang menandatangani proses perdamaian dengan Israel pada 1994, adalah Negara Timur Tengah yang paling dekat dengan Israel.

Namun, perannya dalam proses perdamaian Israel-Palestina tidak sebesar Mesir, juga tidak sebesar Arab Saudi dan kerajaan-kerajaan mini Arab di Teluk Persia, meskipun Yordania berbatasan langsung dengan Israel. Negara-negara inilah, bersama Mesir, yang memiliki pengaruh kuat pada AS dalam mendorong negara adidaya ini menekan Israel agar menyelesaikan konfliknya dengan Palestina. Turki merupakan negara besar di Timur Tengah, anggota NATO, yang sudah sejak awal Israel merdeka pada 1948 sudah berdamai dengan negara itu. Turki juga pernah menjajah Palestina selama ratusan tahun dan

Masyrofaq

baru berakhir pada Perang Dunia I. Namun, peran negara ini dalam proses perdamaian Arab-Israel sangat kecil. Tapi belakangan ini, hubungan Israel dengan negara-negara Timur Tengah semakin dekat karena mereka menghadapi musuh bersama, yaitu Iran. Program nuklir Iran dan Arab Spring yang sedang melanda Suriah (negara Timur Tengah garda depan yang belum berdamai dengan Israel) dan peran Hizbullah pro-Iran di Lebanon (juga tetangga Israel) membuat kebutuhan Israel akan hubungan dengan negara-negara Timur Tengah semakin kuat. Ini karena baik Suriah maupun Hizbullah berada di bawah pengaruh Iran, musuh bebuyutan Israel. Negara-negara Timur Tengah Teluk yang tergabung dalam GCC (Dewan Kerja Sama Teluk) yang terdiri dari Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, dan Kuwait sangat khawatir terhadap program nuklir Iran yang dicurigai berniat membuat bom nuklir walaupun Iran berkali-kali membantahnya dan menyatakan program nuklirnya bertujuan damai, yaitu untuk memasok listrik dalam negeri dan membuat riset kedokteran dan pertanian. Mereka bahkan mendorong AS menyerang situs-situs nuklir Iran dengan biaya dari mereka sebagaimana yang dilaporkan Wikileaks. Sikap mereka ini juga yang menaikkan nyali Israel untuk menyerang Iran kalau dalam waktu dekat ini, Iran tidak menghentikan program nuklirnya. Saling membutuhkan antara Israel dan GCC+Mesir inilah yang membuat perdamaian Palestina-Israel, yang menjadi batu sandungan bagi perdamaian mereka, ingin diselesaikan segera. Negara-negara Timur Tengah ini, selain khawatir dengan program nuklir Iran, juga khawatir dengan pengaruh Iran yang semakin membesar di Timur Tengah. Sebagaimana kita ketahui, pengaruh Iran kini membentang dari Irak hingga Lebanon dan juga Hamas, yang kesemuanya merupakan musuh GCC, Mesir, Yordania, dan negara Timur Tengah lainnya. Persis sama dengan kekhawatiran Israel. Maka kini Israel menyadari konfliknya dengan Palestina mesti diselesaikan segera sehingga mereka bisa melakukan hubungan diplomatik yang terbuka dengan negara-negara Timur Tengah. Kalau hal ini terjadi, GCC dan Mesir bisa berharap pada Israel untuk menghentikan program nuklir Iran dan memotong tangan Iran di Timur Tengah.

Peneliti sependapat dengan pendapat Smith Al-Hadar yang mengemukakan bahwa dengan merdekanya Palestina dapat menyudutkan posisi Israel di mata komunitas internasional sehingga Israel wajib mematuhi hasil kesepakatan tersebut. Rencana Israel, khususnya Partai Likud, yang tak bersedia memerdekakan Palestina kecuali memberinya otonomi luas sebagaimana saya katakana di atas juga lenyap. Israel kini tidak hanya menghadapi Palestina, tapi juga

menghadapi komunitas internasional. Bahkan Uni Eropa, sekutu Israel, telah menghentikan pinjaman Israel sampai negara itu mewujudkan perdamaian dengan Palestina. Dengan adanya langkah Abbas itu juga membuat posisi AS jadi sulit karena tak bisa lagi membabibuta mendukung Israel apapun yang dilakukan negara itu terhadap Palestina seperti yang selalu dilakukannya selama ini. Kita melihat bagaimana AS mengecam pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan menyatakan pemukiman itu tidak diakuinya.

Adanya kemerdekaan negara Palestina akan berdampak positif bagi rakyat Palestina dalam aspek ekonomi, politik, dan sosial. Sekarang ini Palestina kehilangan akses ekonomi ke Israel. Sebelumnya, orang-orang Palestina menjadi buruh di Israel dengan upah yang lumayan tinggi. Tetapi, sejak Israel membatasi buruh Palestina bekerja di Israel terkait dengan ancaman keamanan berupa serangan-serangan bom bunuh diri terhadap warga sipil Yahudi di Israel menyebabkan Israel mengurangi secara besar-besaran akses lapangan kerja Israel bagi Palestina. Sementara di Palestina sendiri, karena sedikitnya pembangunan terkait dengan kurangnya dana yang dimiliki, membuat Otoritas Palestina di Tepi Barat maupun Hamas yang mendominasi Jalur Gaza tidak dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi buruh Palestina maupun kaum terpelajar tamatan perguruan tinggi. Dalam aspek politik pun Palestina akan mendapatkan keuntungan besar. Selama ini, karena masih berkonflik dengan Israel, Palestina agak terisolasi. Ia pun sulit menyalurkan aspirasi politiknya ke dunia luar akibat belum adanya kedutaan-kedutaan asing di Palestina maupun kedutaan-kedutaan Palestina di luar negeri. Hal ini berdampak pada kurangnya investor yang masuk ke wilayah Palestina karena ketiadaan informasi yang cukup, yang memaparkan peluang-peluang ekonomi yang potensial di Palestina. Aktivitas sosial pun tdk dapat berkembang maksimal karena kurangnya dana untuk membangun institusi-institusi sosial untuk melayani rakyat Palestina yang miskin. Kohesi sosial di antara rakyat Palestina baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza cukup kuat karena adanya kesamaan nasib buruk yang mereka alami selama puluhan tahun. Apabila Palestina telah berdaulat penuh, akan ada banyak investor Palestina di luar negeri yang kaya untuk menanamkan modalnya di Palestina. Mereka juga akan berkontribusi bagi pembangunan Palestina di segala bidang, baik ekonomi, sosial maupun budaya. Sebagaimana diketahui, tidak sedikit orang Palestina di diaspora yang berhasil mengembangkan bisnis mereka dan sebagian lagi menjadi akademisi yang ternama, yang menguasai teknologi mutakhir. Mereka diharapkan akan pulang ke Palestina untuk

Masyrofah

membantu rakyat Palestina baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

Sikap Hamas yang menyambut gembira pengakuan kemerdekaan Palestina oleh PBB. Bagi mereka ini merupakan langkah awal menuju terbentuknya negara Islam Palestina di seluruh kawasan Palestina dan Israel saat ini. Mereka gembira karena pengakuan PBB itu akan berdampak pada legalitas Palestina dalam membebaskan diri dari kungkungan Israel, terbukanya akses ke luar negeri yang memungkinkan Hamas memperoleh senjata-senjata yang lebih canggih dari milik mereka sekarang, yang sangat terbatas. Roket-roket Hamas yang sering ditembakkan dari Jalur Gaza ke wilayah Israel adalah senjata yang mereka rakit sendiri dengan segala keterbatasannya, baik ekonomi maupun teknologi. Israel tak punya kekuatan untuk mengendalikan masuknya senjata-senjata ke Jalur Gaza secara legal. Tapi ini berarti Hamas akan menjadi penghalang bagi kehidupan damai warganya dengan pihak Israel. Dan hal ini merupakan aktivitas yang sia-sia. Ideologi Hamas yang berorientasi Islam, yang menganggap Israel merupakan tombak barat yang ditusukkan untuk menghancurkan Islam sehingga harus dihancurkan. Padahal, Israel merupakan negara terkuat di Timur Tengah dari segi militer. Diperkirakan, gabungan seluruh negara Arab tak mampu mengalahkan Israel yang dipersenjatai dengan senjata-senjata canggih dan mereka memiliki bom nuklir.

Mengenai solusi dua negara (*two states solution*) yang ditawarkan, antara Fatah dan Hamas masing-masing memiliki pandangan yang berbeda. Fatah menyetujui dibangunnya dua negara Israel dan Palestina yang hidup berdampingan, Palestina menempati wilayah sesuai batasan wilayah tahun 1967. Namun Hamas tidak menyetujui itu, prinsip Hamas yaitu Palestina merdeka di wilayahnya sendiri tanpa harus berbagi tanah dengan Israel. Di sisi lain bahwa politik masih membuka jalan yang lebar untuk diadakannya kompromi agar tercapai tujuan bersama. Bukan untuk tujuannya menang seperti dalam perang. Hal ini masih dimungkinkan terjadi adanya perubahan sikap dari Hamas, perlu diingat bahwa pada awal-awal berdiri dan perjuangan Hamas sama sekali menolak Pemilu. Namun pada tahun 2006 Hamas untuk kali pertama mengikuti Pemilu Legislatif dan di luar dugaan berhasil memenangkan pemilu tersebut.

Adapun langkah-langkah yang tepat bagi Palestina agar eksistensi negaranya diakui dunia, maka Palestina harus konsisten menjaga platform bahwa perundingan perdamaian adalah jalan satu-satunya menuju kemerdekaan Palestina. Melawan Israel melalui jalan militer sangat tidak realistis dan Palestina akan kehilangan dukungan

AS dan Uni Eropa. Sebagaimana diketahui, sejak Israel merdeka, AS dan Uni Eropa tidak mengakui perjuangan bersenjata Palestina. AS baru mengakuinya dan membantu financial Palestina hanya setelah terjadi perjanjian perdamaian sementara Israel-Palestina yang dikenal sebagai Kesepakatan Oslo. Almarhum Yasser Arafat yang selalu dituduh teroris oleh Israel dan AS baru diizinkan masuk AS setelah terjadi Kesepakatan Oslo itu. Yang jadi pertanyaan, sejauh mana Palestina mampu berdiplomasi agar mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Hal ini sulit karena posisi tawar Israel dan Palestina tidak berimbang. Israel jauh lebih kuat dari Palestina sehingga Palestina, mau tidak mau, harus memberi konsesi signifikan kepada Israel sehingga memungkinkan Israel setuju memerdekakan Palestina. Konsesi-konsesi itu menyangkut Yerusalem Timur dan perbatasan kedua negara sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Bahwa Palestina harus bisa menerima kenyataan bahwa ia tidak dapat memperoleh seluruh wilayahnya sebelum perang 1967 karena sebagian besarnya sudah jadi ratusan pemukiman Yahudi. Palestina juga harus memberi konsesi mengenai hak pulang warga Palestina. Tidak mungkin Israel setuju menerima sekitar 5 juta pengungsi Palestina pulang ke kampung halamannya di Israel.

Pembangunan pemukiman Yahudi menjadi permasalahan utama yang hingga kini belum terselesaikan. Ada keinginan Israel untuk melanjutkan perundingan damai dengan syarat pembangunan pemukiman Yahudi tetap berjalan. Tentunya hal ini bertentangan dengan kesepakatan bahwa pemukiman harus dihentikan sementara perundingan sedang dilakukan.

Setelah macet sejak September 2010, perundingan perdamaian Israel-Palestina dibuka kembali pada 29 Juli. Ini berkat usaha serius AS sebagai mediator perdamaian. Presiden Barack Obama mengirim Menteri Luar Negeri John Kerry ke Timur Tengah selama enam kali dalam waktu 5 bulan dan terakhir melakukan diplomasi ulang-alik ke Tel Aviv dan Ramallah selama empat hari. Pada 19 Juli 2013 baru Kerry berhasil membujuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas untuk melakukan perundingan langsung di Washington. Di forum ini mereka akan mengembangkan rencana kerja prosedural bagaimana para pihak bisa memproses perdamaian melalui perundingan pada masa mendatang.

Apakah perundingan ini hanya bisa berlangsung setelah Israel memenuhi syarat-syarat Palestina? Syarat-syarat itu adalah, pertama, Israel mengakui perbatasan kedua negara pra-perang 1967; menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat; dan

Masyrofah

ketiga, pembebasan pejuang Palestina dari penjara-penjara di Israel. Jumlah totalnya 4.817 orang. Ketika pertanyaan itu dilontarkan pada Kerry, ia menolak menjawabnya, tapi Menteri Urusan Internasional Israel Yuval Steinitz mengatakan, “Mustahil kami setuju untuk memulai perundingan dengan menentukan batas teritorial atau konsesi Israel atau penghentian konstruksi (pembangunan pemukiman Yahudi).”

Jawaban Steinitz menunjukkan Israel tidak berkomitmen pada syarat-syarat yang sejak dulu dituntut oleh Abbas, kecuali pembebasan bertahap terhadap 104 pejuang Palestina. Itu pun sebenarnya merupakan realisasi dari Perjanjian Sharm El-Sheikh pada 1999 antara Israel dan Palestina. Dalam perjanjian itu, Israel diwajibkan membebaskan seluruh tahanan Palestina. Memang kalau melihat sikap Israel yang diperintah kaum Hawkish selama ini, pernyataan Steinitz itu bisa dipercaya. Abbas terpaksa menerima perundingan tanpa syarat strategis setelah mendapat tekanan dari AS dan Liga Arab. Gedung Putih menekan Palestina dengan ancaman memblokir akses Palestina ke badan-badan PBB, seperti IMF dan Bank Dunia, setelah mayoritas negara di dunia menyetujui kemerdekaan penuh Palestina, yang secara otomatis memungkinkan Palestina menjadi anggota di organ-organ PBB itu. Tapi karena AS merupakan negara donor terbesar di organ-organ PBB itu, pengaruhnya sangat besar. Tanpa persetujuan AS, Palestina tak akan mendapatkan apa yang diinginkan dari PBB.

Liga Arab, yang didominasi Arab Saudi, yang merupakan sekutu AS, dan sekaligus donatur terbesar di Liga Arab, ikut menekan Abbas agar maju ke meja perundingan tanpa syarat seperti diinginkan Israel. Netanyahu, yang berasal dari partai garis keras Likud dan pemerintahan koalisinya yang didukung partai-partai ultra kanan dan agama, juga terpaksa maju ke perundingan setelah Palestina mendapat pengakuan sebagai negara berdaulat di PBB, tekanan AS dan Uni Eropa (UE). Tekanan UE itu berupa panduan yang dikeluarkan akhir Juni lalu, di mana UE menegaskan, seluruh entitas Israel yang terletak atau aktif di wilayah yang diduduki Israel setelah perang 1967 tidak berhak menerima hibah, hadiah, atau pinjaman dalam bentuk apa pun dari UE. “Ini sangat problematik bagi Israel karena untuk pertama kali dalam beberapa tahun terakhir ada pesan jelas kepada publik Israel bahwa UE menganggap sangat serius perbedaan antara wilayah pendudukan dan wilayah Israel sesuai batas tahun 1967,” ungkap Profesor Eyal Chowers dari Tel Aviv University. Israel sendiri cemas melihat pergolakan politik di negara tetangga Mesir dan Suriah, perkembangan Hamas dan Hizbullah di Lebanon, dan khususnya program nuklir Iran sehingga

Netanyahu menganggap perundingan dengan Palestina vital dan strategis.

Apakah kaum Hawkish di Israel serius merundingkan perdamaian Israel-Palestina yang sudah terlibat pertikaian selama 65 tahun, bahkan lebih dari satu abad? Pertanyaan ini juga menggantung di kepala orang Palestina karena sejak Kesepakatan Oslo tahun 1993 antara pemimpin PLO Yasser Arafat dan pemerintahan Partai Buruh pimpinan duet Yitzhak Rabin dan Simon Peres, pemerintahan Israel di bawah pemerintah garis keras sering mengingkari kesepakatan yang sudah dibuat dengan Palestina.

Untuk itu, dalam pertemuan dengan John Kerry, Ketua Perunding Palestina Saeb Erekat menegaskan, Palestina tidak akan terlibat dalam perundingan damai usulan Kerry kecuali jika Israel menjamin akan menghormati perbatasan kedua negara di masa yang akan datang. Erekat memberi tahu Kerry tanpa dasar yang jelas pada perbatasan tahun 1967, pembekuan pemukiman dan sikap yang pasti untuk membebaskan tahanan Palestina oleh Israel, Palestina tak akan terlibat dalam perundingan. Memahami keraguan Palestina itu, Steinitz menjanjikan negosiasi damai akan dilakukan dengan serius selama sedikitnya Sembilan bulan.⁹

Kesimpulan

Pada hakikatnya Palestina sudah merdeka sejak dideklarasikan pada Deklarasi Kemerdekaan Palestina 15 November 1988 di Aljazair. Namun faktanya rakyat Palestina masih terjajah oleh Israel. Hal inilah yang mendorong Presiden Mahmoud Abbas untuk mengajukan permohonan PBB dan akhirnya Majelis Umum menyetujui peningkatan status Palestina menjadi anggota penuh (*full member*) yang sebelumnya hanya sebagai negara pemantau (*observer*) pada 29 November 2012. Dan peningkatan status itulah yang menjadi substansi resolusi PBB tersebut. Penulis memahami ketika dunia memaknainya sebagai kemerdekaan Palestina, karena semenjak dideklarasikan negara Palestina tahun 1988, namun yang terjadi malah konflik yang tak terselesaikan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu merupakan "Kemerdekaan Palestina Jilid 2". Harapannya dengan meredekanya Palestina dapat menyudutkan posisi Israel di mata komunitas internasional sehingga Israel wajib mematuhi hasil kesepakatan tersebut. Rencana Israel, khususnya Partai Likud, yang tak bersedia

⁹Smith Al-Hadar, *Israel dan Palestina Menuju Perdamaian?*, Makalah.

Masyrofah

memerdekakan Palestina kecuali memberinya otonomi luas. Israel kini tidak hanya menghadapi Palestina, tapi juga menghadapi komunitas internasional. Bahkan Uni Eropa, sekutu Israel, telah menghentikan pinjaman Israel sampai negara itu mewujudkan perdamaian dengan Palestina. Dengan adanya langkah Abbas itu juga membuat posisi AS jadi sulit karena tak bisa lagi membabibuta mendukung Israel apapun yang dilakukan negara itu terhadap Palestina seperti yang selalu dilakukannya selama ini. Kita melihat bagaimana AS mengecam pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan menyatakan pemukiman itu tidak diakuinya dan melanggar hukum internasional. Di satu sisi memang belum terlihat bahwa peningkatan status tersebut dapat menekan Israel, ini terlihat pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat masih berlangsung bahkan menurut berita terkini akan sampai ke jantung Tepi Barat. Namun, dengan adanya peningkatan status di PBB Palestina mendapat dukungan lebih banyak dari negara internasional. Hal ini membuka peluang dilanjutkannya perundingan damai Palestina yang bertujuan mewujudkan *"two-states solution"* (Penyelesaian dua negara Palestina-Israel), dimana Palestina menginginkan negara yang mencakup semua kawasan yang dikuasai Israel tahun 1967, namun sekitar 500.000 warga Yahudi tinggal di lebih 200 permukiman di Tepi Barat termasuk Jerusalem Timur. Permukiman itu dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, namun Israel menyanggahnya.

Adapun mengenai kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perundingan damai Israel-Palestina sehingga sulit diselesaikan adalah faktor internal dan eksternal Israel dan faktor internal dan eksternal Palestina. **Faktor internal Israel** adalah Palestina sering dijadikan isu politik di antara partai-partai politik di Israel, Kebijakan terhadap Palestina sering menjadi penyebab kalah atau menangnya suatu partai di Israel. Pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. Perebutan wilayah Tepi Barat dan Jerusalem Timur. Larangan Palestina memiliki angkatan bersenjata. Perbatasan selalu diawasi tentara Israel yang seringkali menjadi pemicu konflik dengan warga Palestina. Perbedaan pemahaman Partai yang berkuasa yaitu antara Partai Kanan Tengah Likud yang cenderung kaku dalam menjalankan perundingan damai, sedangkan Partai Kiri Tengah Buruh menerima resolusi 242 mengenai rumusan tanah untuk perdamaian (*land of peace*). **Faktor eksternal Israel** adalah dukungan tanpa batas Amerika Serikat terhadap Israel baik secara politik, ekonomi dan militer. **Faktor Internal Palestina** yaitu perbedaan pandangan antara Fatah dan Hamas. Lemahnya *bargaining power*

(posisi tawar) Palestina terhadap Israel. **Faktor eksternal Palestina** adalah kurangnya dukungan dari negara-negara Timur Tengah, Asia dan Eropa terhadap perundingan damai Israel-Palestina. Tidak optimalnya upaya diplomasi yang dilakukan negara-negara Arab terhadap perundingan damai.

Negara-negara Timur Tengah yang secara resmi telah berdamai dengan Israel adalah Turki, Mesir, dan Yordania. Pada masa sebelum Februari 2011, Mesir banyak berperan dalam mengatasi konflik-konflik Israel dan Palestina. Selama masa Arab Spring ini, di mana Mesir merupakan salah satu Negara Timur Tengah yang mengalaminya, peran Mesir dalam proses hubungan Israel-Palestina agak berkurang. Tahun lalu, di era Ikhwanul Muslimin, Mesir memprakarsai gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Itulah satu-satunya keterlibatan Mesir dalam konflik Palestina Israel sejak jatuhnya Presiden Hosni Mubarak pada 11 Februari 2011. Biasanya Mesir, Negara Timur Tengah garda depan yang paling berpengaruh baik terhadap Israel maupun Negara Timur Tengah lain, selalu hadir dalam mendorong proses perdamaian Palestina-Israel. Hubungan Israel dengan Yordania, yang menandatangani proses perdamaian dengan Israel pada 1994, adalah Negara Timur Tengah yang paling dekat dengan Israel. Namun, perannya dalam proses perdamaian Israel Palestina tidak sebesar Mesir, juga tidak sebesar Arab Saudi dan kerajaan-kerajaan mini Arab di Teluk Persia, meskipun Yordania berbatasan langsung dengan Israel. Negara-negara inilah, bersama Mesir, yang memiliki pengaruh kuat pada AS dalam mendorong negara adidaya ini menekan Israel agar menyelesaikan konfliknya dengan Palestina. Turki merupakan negara besar di Timur Tengah, anggota NATO, yang sudah sejak awal Israel merdeka pada 1948 sudah berdamai dengan negara itu. Turki juga pernah menjajah Palestina selama ratusan tahun dan baru berakhir pada Perang Dunia I. Namun, peran negara ini dalam proses perdamaian Arab-Israel sangat kecil. Tapi belakangan ini, hubungan Israel dengan negara-negara Timur Tengah semakin dekat karena mereka menghadapi musuh bersama, yaitu Iran. Program nuklir Iran dan Arab Spring yang sedang melanda Suriah (Negara Timur Tengah garda depan yang belum berdamai dengan Israel) dan peran Hizbullah pro-Iran di Lebanon (juga tetangga Israel) membuat kebutuhan Israel akan hubungan dengan negara-negara Timur Tengah semakin kuat.

Rekomendasi

- Resolusi PBB seharusnya diiringi dengan diberlakukannya sanksi terhadap pihak yang melanggar ketentuan resolusi tersebut. Selama

Masyrofah

ini resolusi yang dikeluarkan PBB hanyalah dianggap angin lalu oleh Israel, lantaran tidak ada sanksi yang diberlakukan.

- Bersatunya negara-negara Arab menjadi faktor penentu bagi terwujudnya negara Palestina merdeka dalam arti nyata.
- Pemerintah Indonesia diharapkan berperan aktif dalam memberi dukungan dan mengupayakan diplomasi yang optimal dalam perundingan damai.

PustakaAcuan

Al-Hadar, Smith, *Israel dan Palestina Menuju Perdamaian?*, Makalah.

Findley, Paul, *Diplomasi Munafik Yahudi (Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel)*, Bandung: Mizan, 1995.

Juwana, Hikmahanto, *Palestina Merdeka*, Seputar Indonesia, 26 September 2011, diakses pada www.gagasanhukum.com, 23 Maret 2013.

Liputan Wawancara dengan wartawan di New York, AS, seperti dilansir *AFP*, Sabtu (1/12/2012).

Mawardi, H.A Chalid, "*Dimensi Internal Timur Tengah Pasca Perang Teluk: Peran Suriah*", dalam Bantarto Bandoro, *Timur Tengah Pasca Perang Teluk: Dimensi Internal dan Eksternal*, Jakarta, CSIS, 1991.

Wawancara pribadi dengan Dr. Hamdan Basyar, M.Si (Peneliti bidang Politik LIPI dan President Executive The Indonesian Society for Middle East Studies), Rabu 16 Oktober 2013 di LIPI

Wawancara pribadi dengan Hamdan Basyar, (Peneliti LIPI Bidang Politik Timur Tengah dan Presiden Eksekutif The Indonesian Society For Middle East Studies) pada Rabu 16 Oktober 2013.